

## Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ *output* yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**K.JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNPB dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L; Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

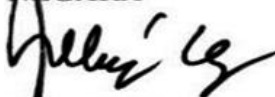
Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA**



**HELMIZAR**

**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....   | i   |
| 2. | Kata Pengantar Kepala PKAKN.....  | iii |
| 3. | Daftar Isi.....   | v   |
| 4. | Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Pada Mitra Kerja Komisi III.....   | 1   |
| 5. | Sistem Pengendalian Intern.....   | 3   |
|    | 1. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib.....  | 4   |
|    | 2. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian /Lembaga belum tertib.....  | 8   |
|    | 3. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib.....  | 15  |
| 6. | Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....  | 18  |
|    | 1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.....  | 19  |
|    | 2. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang /Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.....   | 24  |
|    | 3. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai..... | 26  |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016  
PADA MITRA KERJA KOMISI III**

---

**GAMBARAN UMUM**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

| No                                  | Temuan   |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sistem Pengendalian Internal</b> |  |
| 1                                   | Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi |

| No   | Temuan   |
|--|--|
| 2  | Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai   |
| 3  | Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten  |
| 4  | Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan  |
| 5  | Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai   |
| 6  | Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib   |
| 7  | Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib  |
| 8  | Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib   |
| 9  | Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai   |
| 10   | Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas   |
| 11   | Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai  |
| 12   | Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas   |
| <b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b> |  |
| 1  | Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan   |
| 2  | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar  |
| 3  | Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan   |
| 4  | Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai. |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah temuan yang spesifik terkait dengan mitra kerja Komisi III, yaitu temuan SPI No. 6, 7 dan 8 dan Kepatuhan No. 1, 3 dan 4.

# **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



## 6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait K/L mitra kerja Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut :

| <b>Penjelasan</b> | Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 ( <i>Audited</i> ) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.                     |  |  |                                    |
|-------------------|--|--|--|------------------------------------|
|                   | Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut: |  |  |                                    |
|                   | No   | Permasalahan   | Jumlah<br>KL                               | Nilai Temuan<br>(Rp)               |
|                   | 1  | Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>  | 15   | 92.846.497.535,00                  |
|                   | 2  | Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan           | 41   | 475.883.744.990,41<br>SAR52.500,00 |
|                   | 3  | Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya. | 7  | 216.279.435.909,00                 |
| 4                 | Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.  | 25   | 82.585.381.193,74                          |                                    |
| <b>Jumlah</b>     |  |  | <b>867.595.059.528,15<br/>SAR52.500,00</b> |                                    |

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencatatan persediaan tidak dilakukan *stock opname* terjadi pada 15 K/L sebesar Rp92.846.497.535,00, diantaranya terjadi pada:

| K/L        | Permasalahan  | Nilai (Rp) |
|------------|---|------------|
| Komnas HAM | Pembelian barang yang menghasilkan persediaan dilakukan oleh masing-masing Biro dan tidak dilakukan penatausahaan | 0          |

- b. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada 41 K/L sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52,500.00 diantaranya terjadi pada:

| K/L                                     | Permasalahan  | Nilai (Rp)  |
|---|---|-------------|
| Kejaksaan Agung                         | Pencatatan atas dua barang rampasan yang digabung menjadi satu  | 114.639.000 |
|   | Perbedaan Saldo beban persediaan dengan aplikasi persediaan   | 50.086.500  |
| Kementerian Hukum dan HAM               | Paspor yang dikembalikan belum ditatausahakan   | 842.081.025 |
|   | Kesalahan Pencatatan jumlah persediaan  |             |
| Komnas HAM                              | Pencatatan persediaan dilakukan hanya pada gudang Biro Umum   | 0           |
|   | Pencatatan mutasi keluar masuk persediaan hanya dilakukan di gudang yang merupakan pembelian dari Biro Umum | 203.324.151 |
|   | Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN dan Laporan Persediaan                                | 118.547.758 |
| Komisi Pemberantasan Korupsi            | Persediaan Tidak Tertib   | 0           |
| Komisi Yudisial                         | Persediaan Tidak Tertib   | 0           |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Persediaan Tidak Tertib   | 0           |

Khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, BPK menemukan permasalahan terkait dengan pencatatan uraian nama persediaan pada persediaan lainnya, adanya persediaan bahan pemeliharaan senilai Rp0,00, persediaan amunisi yang kurang memadai, barang rampasan dicatat global dan salah catat klarifikasi.

- c. Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya terjadi pada tujuh K/L sebesar Rp216.279.435.909,00, diantaranya;

| K/L        | Permasalahan   | Nilai (Rp)    |
|------------|--|---------------|
| Komnas HAM | Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri | 1.056.759.420 |
|            | jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya   | 273.669.092   |

- d. Permasalahan signifikan lainnya terkait Persediaan terjadi pada 25 K/L sebesar Rp82.585.381.193,74 diantaranya terjadi pada:

| K/L                      | Permasalahan  | Nilai (Rp)     |
|--------------------------|---|----------------|
| Kejaksaan Agung          | Pembelian obat-obatan tidak didukung bukti pembelian yang memadai | 89.041.900     |
| Kepolisian Negara RI     | Pengelolaan persediaan BBM yang tidak memadai                     | 175.941.696,69 |
| Badan Narkotika Nasional | Penatausahaan Persediaan belum tertib                             | 0              |
| Mahkamah Konstitusi      | Tidak didukung dokumen sumber                                     | 237.868.400    |

**Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3.

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Akibat</b> | Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.   |
| <b>Saran</b>  | Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan. |

## 7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait K/L mitra Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

| <b>Penjelasan</b> | <p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:</p>  |           |                              |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
|-------------------|---|-----------|------------------------------|-----------|---|---|--|----|---|---|--|----|----------------------|---|-------------------------|---|------------------|---|--|----|----------------------|---|--|----|--------------------|---|--|----|--------------------|---|---------------------------------|----|-------------------|---|--|---|------------------|---|---|---|----------------------|----|-----------------------|----|--------------------|----|----------------------|----|----------------------|---------------|--|--|------------------------------|
|                   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 90%;">Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:</p>  | No        | Permasalahan                 | 1         | Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister | 2 | Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai | 3  | Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai | 4 | Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| No                | Permasalahan  |           |                              |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 1                 | Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister   |           |                              |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 2                 | Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai  |           |                              |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 3                 | Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai   |           |                              |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 4                 | Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai  |           |                              |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
|                   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Permasalahan</th> <th style="width: 15%;">Jumlah KL</th> <th style="width: 15%;">Nilai Temuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>AT Belum Dicatat dan Belum di-IP</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">6.182.491.207,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>AT Tidak Diketahui Keberadaannya</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: right;">1.187.396.777.348,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Duplikasi Pencatatan AT</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">2.951.140.060,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">4.627.802.931.150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">957.344.403.797,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: right;">766.863.605.584,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Aset Rusak Berat Belum Direklas</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">81.526.638.098,57</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.344.341.960,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">(383.433.651.544,85)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>AT Belum Dimanfaatkan</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">625.201.547.636,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Permasalahan Lainnya</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: right;">2.201.897.123.362,28</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Jumlah</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10.075.077.348.658,60</b></td> </tr> </tbody> </table> | No        | Permasalahan                 | Jumlah KL | Nilai Temuan (Rp)   | 1 | AT Belum Dicatat dan Belum di-IP   | 20 | 6.182.491.207,00  | 2 | AT Tidak Diketahui Keberadaannya   | 28 | 1.187.396.777.348,60 | 3 | Duplikasi Pencatatan AT | 5 | 2.951.140.060,00 | 4 | AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan | 20 | 4.627.802.931.150,00 | 5 | AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN | 25 | 957.344.403.797,00 | 6 | KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT | 17 | 766.863.605.584,00 | 7 | Aset Rusak Berat Belum Direklas | 20 | 81.526.638.098,57 | 8 | Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya | 1 | 1.344.341.960,00 | 9 | Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset | 6 | (383.433.651.544,85) | 10 | AT Belum Dimanfaatkan | 10 | 625.201.547.636,00 | 11 | Permasalahan Lainnya | 44 | 2.201.897.123.362,28 | <b>Jumlah</b> |  |  | <b>10.075.077.348.658,60</b> |
| No                | Permasalahan  | Jumlah KL | Nilai Temuan (Rp)            |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 1                 | AT Belum Dicatat dan Belum di-IP  | 20        | 6.182.491.207,00             |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 2                 | AT Tidak Diketahui Keberadaannya  | 28        | 1.187.396.777.348,60         |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 3                 | Duplikasi Pencatatan AT   | 5         | 2.951.140.060,00             |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 4                 | AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan  | 20        | 4.627.802.931.150,00         |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 5                 | AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN  | 25        | 957.344.403.797,00           |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 6                 | KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT  | 17        | 766.863.605.584,00           |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 7                 | Aset Rusak Berat Belum Direklas   | 20        | 81.526.638.098,57            |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 8                 | Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya  | 1         | 1.344.341.960,00             |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 9                 | Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset   | 6         | (383.433.651.544,85)         |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 10                | AT Belum Dimanfaatkan   | 10        | 625.201.547.636,00           |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| 11                | Permasalahan Lainnya  | 44        | 2.201.897.123.362,28         |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |
| <b>Jumlah</b>     |   |           | <b>10.075.077.348.658,60</b> |           |   |   |  |    |   |   |  |    |                      |   |                         |   |                  |   |  |    |                      |   |  |    |                    |   |  |    |                    |   |                                 |    |                   |   |  |   |                  |   |   |   |                      |    |                       |    |                    |    |                      |    |                      |               |  |  |                              |

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

- a. Terdapat Aset Tetap pada 20 K/L sebesar Rp6.182.491.207,00 yang belum dilakukan pencatatan ke dalam Neraca/Laporan BMN dan belum dilakukan inventarisasi dan pencatatan, diantaranya terjadi pada:

| K/L                          | Permasalahan  | Nilai (Rp)    |
|------------------------------|---|---------------|
| Mahkamah Agung               | Aset tetap belum dicatat                                      | 6.068.900     |
|                              | Terdapat konstruksi dalam pengerjaan yang belum dicatat       | 3.018.842.610 |
| Kejaksaan Agung              | AT Tanah belum dilakukan penilaian kembali                    |               |
| Komisi Pemberantasan Korupsi | Inventarisasi atas BMN terakhir kali dilakukan pada 2007      | 0             |
| Komisi Yudisial              | Pengadaan Aset Tetap lainnya belum dicatat dalam SIMAK BMN    | 304.879.000   |
|                              | 11 dari 12 Kantor Penghubung KY belum dilakukan inventarisasi | 0             |

- b. Aset Tetap pada 28 K/L tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 1.187.396.777.348,60, diantaranya terjadi pada:

| K/L                          | Permasalahan  | Nilai (Rp)      |
|------------------------------|---|-----------------|
| Mahkamah Agung               | Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya.       | 488.026.666     |
| Kejaksaan Agung              | Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya.                                  | 1.057.467.682   |
| Kementerian Hukum & HAM      | BMN yang telah didistribusikan ke satuan kerja namun lokasinya tidak definitif  | 445.116.222.242 |
| Badan Narkotika Nasional     | Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang masih dalam proses penelusuran       | 2.544.834.496   |
| Komnas HAM                   | Aset Tetap berupa peralatan dan mesin tidak dilengkapi dengan lokasi keberadaan | 9.216.652.066   |
| Komisi Pemberantasan Korupsi | Aset Tetap berupa <i>telephone mobile</i> masih ditelusuri keberadaannya        |                 |

- c. Terdapat duplikasi pencatatan Aset Tetap pada lima K/L sebesar Rp2.951.140.060,00, diantaranya terjadi pada:

| K/L                          | Permasalahan   | Nilai (Rp)  |
|------------------------------|--|-------------|
| Kejaksaan Agung              | Terdapat duplikasi pencatatan gedung dan bangunan berupa rumah           | 175.040.000 |
| Komisi Pemberantasan Korupsi | Aset gedung dan bangunan yang sudah dibongkar masih dicatat sebagai aset | 106.100.060 |

- d. Aset Tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan pada 20 K/L sebesar Rp4.627.802.931.150,00, diantaranya terjadi pada:

| K/L                      | Permasalahan  | Nilai (Rp)    |
|--------------------------|---|---------------|
| Mahkamah Agung           | Aset Tetap tanah negara dimanfaatkan pihak lain tanpa izin dan aset dalam sengketa            | 0             |
| Kejaksaan Agung          | Aset tidak didukung dokumen kepemilikan yang sah  | 2.232.946.541 |
| Badan Narkotika Nasional | Hibah tanah yang telah disahkan namun belum disertai dengan penyerahan sertifikat kepemilikan | 5.871.138.000 |

- e. Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp957.344.403.797,00 pada 25 K/L, antara lain terjadi pada:

| K/L                      | Permasalahan   | Nilai (Rp)    |
|--------------------------|--|---------------|
| Mahkamah Agung           | Terdapat tanah belum bersertifikat, BPKB belum seluruhnya dikuasai dan rumah dinas berdiri di atas pemda | 0             |
| Kejaksaan Agung          | Aset Tetap gedung dan kendaraan digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN         | 1.035.087.000 |
| Badan Narkotika Nasional | Aset Tetap yang diserahkan masih dicatat dan diakui sebagai aset tetap belum dihibahkan                  | 1.383.971.000 |

- f. Terdapat KDP mangkrak pada 17 K/L sebesar Rp766.863.605.584,00, antara lain terjadi pada:

| K/L             | Permasalahan  | Nilai (Rp)    |
|-----------------|---|---------------|
| Kejaksaan Agung | Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama sehingga diragukan penyelesaian dan penyajiannya | 2.726.977.500 |

| K/L                     | Permasalahan   | Nilai (Rp)    |
|-------------------------|--|---------------|
| Dewan Perwakilan Daerah | Penyelesaian aset tetap KDP berlarut-larut dan belum mengungkap secara memadai | 5.288.199.364 |

- g. Terdapat aset rusak belum direklasifikasi sebesar Rp81.526.638.098,57 pada 20 K/L, antara lain terjadi pada:

| K/L                          | Permasalahan   | Nilai (Rp)    |
|------------------------------|--|---------------|
| Mahkamah Agung               | Aset rusak belum direklasifikasi ke aset lain-lain   | 1.704.740.566 |
| Kejaksaan Agung              | Terdapat BMN dalam kondisi rusak masih dicatat dalam kondisi baik                            | 398.315.600   |
| Komisi Pemberantasan Korupsi | Telephone mobile dan mesin absen dalam kondisi rusak namun masih tercatat sebagai aset tetap | 0             |

- h. Perhitungan penyusutan Aset Tetap yang tidak akurat dan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang melebihi nilai aset sebesar minus Rp383.433.651.544,85 terjadi pada enam K/L yaitu antara lain pada:

| K/L            | Permasalahan  | Nilai (Rp) |
|----------------|---|------------|
| Mahkamah Agung | Perhitungan penyusutan atas KDP belum dilakukan dan kelebihan pencatatan penyusutan | 0          |

- i. Aset Tetap yang belum dimanfaatkan sebesar Rp625.201.547.636,00 pada sepuluh K/L, antara lain terjadi pada:

| K/L            | Permasalahan   | Nilai (Rp)  |
|----------------|--|-------------|
| Mahkamah Agung | Belum mendapatkan atas pengadaan aset tetap sebesar yang belum digunakan | 501.427.000 |
|                | Barang yang belum digunakan sebanyak 11 jenis dan sejumlah 37 unit       | 538.520.000 |

- j. Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 44 K/L sebesar Rp2.201.897.123.362,28, diantaranya terjadi pada

| K/L            | Permasalahan  | Nilai (Rp)  |
|----------------|---|-------------|
| Mahkamah Agung | Terdapat risiko kehilangan aset tetap terhadap penghapusan KDP yang tidak sesuai prosedur | 533.861.450 |



| <b>K/L</b>                | <b>Permasalahan</b>  | <b>Nilai (Rp)</b> |
|---------------------------|--|-------------------|
| Mahkamah Agung            | Administrasi pinjam pakai aset dari pihak lain belum tertib  | 0                 |
|                           | Aset tetap berupa peralatan dan mesin bernilai buku minus  | 4.808.012.785     |
|                           | Aset tetap nilai perolehan dan nilai buku Rp1,00   | 11.063            |
|                           | Terdapat transaksi normalisasi BMN aset tetap direklasifikasi menjadi ekstrakomptabel                | 36.850.000        |
|                           | Terdapat barang yang tidak dapat dikapitalisasi namun masih dilaporkan                               | 90.235.792        |
|                           | Selisih jumlah mutasi keluar dengan mutasi masuk   | 1.853.171.915     |
|                           | Terdapat perbedaan nilai penambahan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal                     | 16.380.556.582    |
|                           | Rincian dan dokumen pendukung daftar koreksi pencatatan aset tetap belum memadai                     | 0                 |
|                           | Nilai koreksi revaluasi aset di neraca berbeda dengan yang terjadi LPE                               | 0                 |
|                           | Dokumen pendukung KDP belum diperoleh  |                   |
|                           | Selisih perhitungan reklasifikasi KDP menjadi barang jadi dengan penambahan aset dari KDP            | 17.937.727.728    |
|                           | Terdapat KDP yang selesai belum dicatat sebagai aset tetap   | 34.952.138.273    |
|                           | Terdapat BMN yang masih belum dihapus setelah keluar SK penghapusan                                  | 1.268.545.510     |
|                           | Terdapat selisih nilai aset tetap yang dihapuskan antara SIMAK BMN dengan SK penghapusan             | 5.198.682.617     |
| Kementerian Hukum dan HAM | Terdapat biaya yang belum diatribusikan ke belanja modal sebagai penambah nilai perolehan aset tetap | 449.325.000       |
| Komnas HAM                | Terdapat aset tetap yang hilang dan sudah dihapuskan namun belum diproses                            | 27.394.575        |

|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Mahkamah Konstitusi</td> <td>SK penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan aset tetap dari SIMAK BMN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Normalisasi belum ditindaklanjuti dengan laporan kepada DJKN sebagai bahan verifikasi laporan BMN</td> <td>211.813.645</td> </tr> <tr> <td>KPK</td> <td>Aset tetap berupa server masih menggunakan nomor aset yang lama</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Komisi Yudisial</td> <td>Perpindahan barang tidak termonitor dan belum dilakukan pemutakhiran data</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>BMN yang diserahkan belum dilengkapi berita acara serah terima</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |              |            | K/L | Permasalahan | Nilai (Rp) | Mahkamah Konstitusi | SK penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan aset tetap dari SIMAK BMN | 0 | Normalisasi belum ditindaklanjuti dengan laporan kepada DJKN sebagai bahan verifikasi laporan BMN | 211.813.645 | KPK | Aset tetap berupa server masih menggunakan nomor aset yang lama | 0 | Komisi Yudisial | Perpindahan barang tidak termonitor dan belum dilakukan pemutakhiran data | 0 | BMN yang diserahkan belum dilengkapi berita acara serah terima | 0 |
|---|--|--------------|------------|-----|--------------|------------|---------------------|---|---|---|-------------|-----|---|---|-----------------|---|---|--|---|
|   | K/L  | Permasalahan | Nilai (Rp) |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
| Mahkamah Konstitusi                           | SK penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan aset tetap dari SIMAK BMN  | 0            |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
|   | Normalisasi belum ditindaklanjuti dengan laporan kepada DJKN sebagai bahan verifikasi laporan BMN  | 211.813.645  |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
| KPK   | Aset tetap berupa server masih menggunakan nomor aset yang lama  | 0            |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
| Komisi Yudisial                               | Perpindahan barang tidak termonitor dan belum dilakukan pemutakhiran data  | 0            |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
|   | BMN yang diserahkan belum dilengkapi berita acara serah terima   | 0            |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
| <b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b> | <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap .</li> </ol>  |              |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
| <b>Akibat</b>                                 | <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;</li> <li>Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan</li> <li>Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L.</li> </ol>  |              |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |
| <b>Saran</b>                                  | <p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi III perlu mengingatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan K/L masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;</li> <li>Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;</li> </ol>  |              |            |     |              |            |                     |   |   |   |             |     |   |   |                 |   |   |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li><li>d. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.</li></ul> |
|--|--|

## 8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib

Terkait dengan K/L mitra Komisi III BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

| Penjelasan  | Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 ( <i>audited</i> ) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i> , hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00. |   |                   |                           |                |                                      |               |  |  |
|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--|--|
|   | Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:  |   |                   |                           |                |                                      |               |  |  |
|   | <b>Tabel Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016</b>   |   |                   |                           |                |                                      |               |  |  |
|   | <b>No</b>   | <b>Permasalahan</b>                                 | <b>Jumlah K/L</b> | <b>Nilai Temuan (Rp)</b>  |                |                                      |               |  |  |
|   | 1   | ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan | 5                 | 43.176.553.533,00         |                |                                      |               |  |  |
|   | 2   | ATB tidak diamortisasi                              | 6                 | 162.429.853.090,00        |                |                                      |               |  |  |
|   | 3   | Amortisasi ATB tidak akurat                         | 4                 | 26.515.315.860,63         |                |                                      |               |  |  |
|   | 4   | Pencatatan ATB tidak tertib                         | 6                 | 130.720.654.628,00        |                |                                      |               |  |  |
|   | 5   | Permasalahan lainnya                                | 9                 | 13.147.983.000,00         |                |                                      |               |  |  |
|   | <b>Jumlah</b>   |   |                   | <b>375.990.360.111,63</b> |                |                                      |               |  |  |
| Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :                                      |   |   |                   |                           |                |                                      |               |  |  |
| a. Aset tak Berwujud tidak diamortisasi terjadi pada enam K/L sebesar Rp162.429.853.090,00, diantaranya terjadi pada: |   |   |                   |                           |                |                                      |               |  |  |
|   | <table border="1"><thead><tr><th>K/L</th><th>Permasalahan</th><th>Nilai (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mahkamah Agung</td><td>Terdapat ATB yang tidak diamortisasi</td><td>1.879.226.300</td></tr></tbody></table>  | K/L   | Permasalahan      | Nilai (Rp)                | Mahkamah Agung | Terdapat ATB yang tidak diamortisasi | 1.879.226.300 |  |  |
| K/L   | Permasalahan  | Nilai (Rp)  |                   |                           |                |                                      |               |  |  |
| Mahkamah Agung  | Terdapat ATB yang tidak diamortisasi  | 1.879.226.300                                       |                   |                           |                |                                      |               |  |  |

|  | <p>b. Amortisasi ATB tidak akurat dan tidak didahului dengan proses verifikasi dan normalisasi terjadi pada empat K/L sebesar Rp26.515.315.860,63, diantaranya terjadi pada:</p> <table border="1" data-bbox="418 265 1073 465"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mahkamah Agung</td> <td>Nilai akumulasi amortisasi lebih besar dari nilai perolehan</td> <td>252.500.000</td> </tr> <tr> <td>Badan Narkotika Nasional</td> <td>Kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya</td> <td>18.445.449.600</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Pencatatan ATB tidak tertib terjadi pada delapan K/L sebesar Rp130.720.654.628,00, diantaranya pada:</p> <table border="1" data-bbox="418 552 1073 760"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mahkamah Agung</td> <td>Terdapat pencatatan Goodwill yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan tidak tercatat</td> <td>1.525.888.902</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Hukum dan HAM</td> <td>Pencatatan ATB atas Software yang tidak tertib dan inventarisasi yang tidak memadai</td> <td>124.163.969.605</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan Aset Tidak Berwujud terjadi pada 9 K/L sebesar Rp13.147.983.000,00, antara lain terjadi pada:</p> <table border="1" data-bbox="418 881 1073 1020"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Badan Narkotika Nasional</td> <td>Kebijakan Akuntansi belum mengakomodasi aset tak berwujud dalam pengerjaan</td> <td>620.181.072</td> </tr> </tbody> </table> | K/L             | Permasalahan | Nilai (Rp) | Mahkamah Agung | Nilai akumulasi amortisasi lebih besar dari nilai perolehan | 252.500.000 | Badan Narkotika Nasional | Kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya | 18.445.449.600 | K/L | Permasalahan | Nilai (Rp) | Mahkamah Agung | Terdapat pencatatan Goodwill yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan tidak tercatat | 1.525.888.902 | Kementerian Hukum dan HAM | Pencatatan ATB atas Software yang tidak tertib dan inventarisasi yang tidak memadai | 124.163.969.605 | K/L | Permasalahan | Nilai (Rp) | Badan Narkotika Nasional | Kebijakan Akuntansi belum mengakomodasi aset tak berwujud dalam pengerjaan | 620.181.072 |
|--|--|-----------------|--------------|------------|----------------|---|-------------|--------------------------|--|----------------|-----|--------------|------------|----------------|--|---------------|---------------------------|---|-----------------|-----|--------------|------------|--------------------------|--|-------------|
| K/L  | Permasalahan   | Nilai (Rp)      |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| Mahkamah Agung                                       | Nilai akumulasi amortisasi lebih besar dari nilai perolehan  | 252.500.000     |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| Badan Narkotika Nasional                             | Kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya   | 18.445.449.600  |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| K/L  | Permasalahan   | Nilai (Rp)      |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| Mahkamah Agung                                       | Terdapat pencatatan Goodwill yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan tidak tercatat   | 1.525.888.902   |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| Kementerian Hukum dan HAM                            | Pencatatan ATB atas Software yang tidak tertib dan inventarisasi yang tidak memadai  | 124.163.969.605 |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| K/L  | Permasalahan   | Nilai (Rp)      |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| Badan Narkotika Nasional                             | Kebijakan Akuntansi belum mengakomodasi aset tak berwujud dalam pengerjaan   | 620.181.072     |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p> | <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat.</li> </ol>  |                 |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |
| <p><b>Akibat</b></p>                                 | <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.</p>   |                 |              |            |                |   |             |                          |  |                |     |              |            |                |  |               |                           |   |                 |     |              |            |                          |  |             |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Saran</b> | Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L. |
|--------------|---|

**KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**1. Pengelolaan PNBП pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan**

Terkait K/L mitra kerja Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

| <b>Penjelasan</b> | <p>Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan realisasi PNBП Lainnya sebesar Rp117.955.377.742.599,00 dan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp41.945.888.535.965,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat menyajikan realisasi PNBП Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp157.317.644.684.473,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada K/L sebesar Rp34.405.512.144.647,00.</p> <p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBП yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:</p> <p><b>a. PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut</b></p> |            |                                   |            |            |    |   |  |  |  |                           |    |                    |  |                       |   |                                   |  |                        |    |                  |  |                       |   |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|------------|------------|----|---|--|--|--|---------------------------|----|--------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|----|------------------|--|-----------------------|---|
|                   | <p><b>Tabel Klasifikasi Permasalahan PNBП</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Permasalahan</th> <th>Jumlah K/L</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PNBП terlambat disetor</td> <td>20</td> <td>602.216.223.695,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. PNBП belum disetor</td> <td>7</td> <td>11.635.865.695,55<br/>SAR52,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. PNBП tidak dipungut</td> <td>10</td> <td>6.083.983.138,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. PNBП kurang pungut</td> <td>9</td> <td>19.550.963.097,78</td> </tr> </tbody> </table>   | No         | Permasalahan                      | Jumlah K/L | Nilai (Rp) | 1. | PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara |  |  |  | a. PNBП terlambat disetor | 20 | 602.216.223.695,67 |  | b. PNBП belum disetor | 7 | 11.635.865.695,55<br>SAR52,500.00 |  | c. PNBП tidak dipungut | 10 | 6.083.983.138,91 |  | d. PNBП kurang pungut | 9 |
| No                | Permasalahan   | Jumlah K/L | Nilai (Rp)                        |            |            |    |   |  |  |  |                           |    |                    |  |                       |   |                                   |  |                        |    |                  |  |                       |   |
| 1.                | PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara  |            |                                   |            |            |    |   |  |  |  |                           |    |                    |  |                       |   |                                   |  |                        |    |                  |  |                       |   |
|                   | a. PNBП terlambat disetor  | 20         | 602.216.223.695,67                |            |            |    |   |  |  |  |                           |    |                    |  |                       |   |                                   |  |                        |    |                  |  |                       |   |
|                   | b. PNBП belum disetor  | 7          | 11.635.865.695,55<br>SAR52,500.00 |            |            |    |   |  |  |  |                           |    |                    |  |                       |   |                                   |  |                        |    |                  |  |                       |   |
|                   | c. PNBП tidak dipungut   | 10         | 6.083.983.138,91                  |            |            |    |   |  |  |  |                           |    |                    |  |                       |   |                                   |  |                        |    |                  |  |                       |   |
|                   | d. PNBП kurang pungut  | 9          | 19.550.963.097,78                 |            |            |    |   |  |  |  |                           |    |                    |  |                       |   |                                   |  |                        |    |                  |  |                       |   |



| No | Permasalahan  | Jumlah K/L | Nilai (Rp)  |
|----|---|------------|---|
| 2. | Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung | 6          | 255.228.777.264,09                                |
| 3. | Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung   | 1          | 17.417.773.000,00                                 |
| 4. | Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan   | 8          | 41,581,484,973.00                                 |
| 5. | Permasalahan PNBP signifikan lainnya                | 29         | 352.596.558.691,89                                |
|    | <b>Jumlah</b>                                       |            | <b>1.306.311.629.556,38</b><br><b>(SAR)52.500</b> |

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. PNBP terlambat disetor terjadi pada 20 K/L diantaranya terjadi pada:**

| K/L                                     | Permasalahan   | Nilai (Rp)       |
|---|--|------------------|
| Mahkamah Agung                          |  | 44.999.200       |
| Kejaksaan Agung                         | Keterlambatan penyetoran denda tilang  | 15.606.000       |
| Kementerian Hukum dan HAM               | Keterlambatan penyetoran atas paten dan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) terlambat setor karena penerapan metode <i>official assesment</i> tidak konsisten | 3.608.645.498,24 |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Bank tempat BNPT membuka rekening tidak langsung menyetorkan jasa giro ke kas negara   | 5.995.157        |

**2. PNBP belum disetor terjadi pada tujuh K/L yaitu:**

| K/L             | Permasalahan  | Nilai (Rp)    |
|-----------------|---|---------------|
| Kejaksaan Agung | Denda Tilang, Biaya Perkara dan uang rampasan belum disetor | 9.972.946.981 |

**3. PNBP tidak dipungut terjadi pada 10 K/L diantaranya terjadi pada:**

| K/L            | Permasalahan   | Nilai (Rp) |
|----------------|----------------|------------|
| Mahkamah Agung | Tidak dipungut | 43.193.617 |

**4. PNBP kurang dipungut terjadi pada sembilan K/L diantaranya terjadi pada:**

| K/L            | Permasalahan   | Nilai (Rp)    |
|----------------|--|---------------|
| Mahkamah Agung | PNBP yang berasal dari sewa tanah dan bangunan serta sewa rumah negara | 27.743.260,55 |

**5. Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp352.596.558.691,89 terjadi pada 29 K/L diantaranya terjadi pada:**

| K/L             | Permasalahan   | Nilai (Rp)        |
|-----------------|--|-------------------|
| Mahkamah Agung  |  | 3.654.000         |
| Kejaksaan Agung | Pendapatan atas jasa giro atas rekening penampungan belum disetorkan   | 271.146.361       |
|                 | Mutasi penyetoran ke kas negara dan pengembalian ke pihak ketiga tidak dapat ditelusuri ke dokumen sumber    | 28.483.426.476.86 |
|                 | Terdapat penyetoran untuk membayar uang pengganti atas perkara yang sama                                     | 40.000.000        |
|                 | Terdapat barang rampasan atas perkara yang telah <i>inkracht</i> namun belum dieksekusi dengan cara disidang | 25.499.522.445    |
|                 | Barang bukti berupa uang tunai hasil lelang ditransfer ke rekening tanpa sepengetahuan                       | 292.658.627       |
|                 | Uang rampasan tidak diketahui keberadaannya  | 2.668.000         |
|                 | Salah mata anggaran penerimaan sewaktu menyetorkan   | 1.035.500.000     |

| K/L                                     | Permasalahan   | Nilai (Rp)      |
|---|--|-----------------|
|   | Salah mata anggaran penerimaan sewaktu menyetorkan   | 4.484.000       |
| Kementerian Hukum dan HAM               | Realisasi PNBPN dirjen AHU menggunakan angka SITP Kemenkeu                                     | 244.908.620     |
|   | Potensi kekurangan penerimaan negara /merugikan negara yang berasal dari bank pengelola PNBPN  | 8.592.632.703,9 |
| Komisi Pemberantasan Korupsi            | KPA belum mengajukan kepada bank perihal mekanisme pelimpahan otomatis jasa giro ke Kas negara | 1.864.453.581   |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rekening Kas Bendahara Pengeliatan masih dikenakan pajak atas bunga jasa giro                  | 16.487.815,61   |

Selain itu, pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3.826.086.751.829,28 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Kejaksaaan Agung

Terdapat permasalahan terkait berkas putusan piutang uang pengganti yang tidak dalam pengelolaan pihak kejaksaan selaku eksekutor sebesar Rp836.291.664.144,00.

### 2. Permasalahan pengungkapan piutang sebesar Rp87.290.426.918,78 pada tujuh K/L

Rincian permasalahannya adalah sebagai berikut:

#### Daftar K/L terkait Penatausahaan Piutang

| K/L                       | Permasalahan   | Nilai (Rp)    |
|---------------------------|--|---------------|
| Kementerian Hukum dan HAM | Penatausahaan piutang paten pada Ditjen KI kurang memadai sehingga terindikasi dimanfaatkan oleh konsultan KI saat proses pemeliharaan paten dari pemegang paten | 2.110.900.000 |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p> | <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPNP;</li> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPNP yang Terutang;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</li> </ol>              |
| <p><b>Akibat</b></p>                                 | <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPNP yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp8.004.954.758,00;</li> <li>Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPNP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp8.384.025.641,00 karena pungutan PNBPNP tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional;</li> <li>Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;</li> <li>Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.</li> </ol> |
| <p><b>Saran</b></p>                                  | <p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, atas rekomendasi BPK dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPNP;</li> <li>Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPNP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;</li> <li>Mengoptimalkan koordinasi dengan DJKN dalam pengurusan Piutang Negara; dan</li> <li>Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPNP yang bersumber dari BMN.</li> </ol>            |

**3. Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan**

Terkait K/L mitra Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

| <b>Penjelasan</b>  | <b>a. Hibah Langsung Berupa Barang Sebesar Rp247.936.000,00 pada Satu K/L.</b>  |             |                      |                         |            |    |     |            |        |            |   |     |             |                      |                         |
|--|---|-------------|----------------------|-------------------------|------------|----|-----|------------|--------|------------|---|-----|-------------|----------------------|-------------------------|
|  | <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>K/L</th><th>Nilai (Rp)</th><th>Lokasi</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>BNN</td><td>247.936.000</td><td>BNNP Lampung (tanah)</td><td>Belum dicatatkan ke BUN</td></tr></tbody></table> |             |                      |                         |            | No | K/L | Nilai (Rp) | Lokasi | Keterangan | 1 | BNN | 247.936.000 | BNNP Lampung (tanah) | Belum dicatatkan ke BUN |
|  | No  | K/L         | Nilai (Rp)           | Lokasi                  | Keterangan |    |     |            |        |            |   |     |             |                      |                         |
| 1  | BNN   | 247.936.000 | BNNP Lampung (tanah) | Belum dicatatkan ke BUN |            |    |     |            |        |            |   |     |             |                      |                         |
| <b>b. Hibah Langsung Berupa Jasa Sebesar Rp2.213.310.987.215,28 pada Tiga K/L.</b><br>Selain permasalahan ketidaktertiban pengesahan hibah langsung, hasil pemeriksaan juga menunjukkan beberapa permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan hibah langsung sebesar Rp253.040.511.630,00 yang terjadi pada enam K/L sebagai berikut.<br><br>1. Pemeriksaan secara uji petik atas sebanyak 16 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang baru terbentuk di tahun 2016, terdapat tiga BNNK baru yang pada tahun 2016 mendapatkan hibah langsung berupa uang/barang/jasa, yaitu BNNK Sumbawa, BNNK Metro, dan BNNK Tebing Tinggi dengan total hibah sebesar Rp305.400.000,00. BNN belum membuat kebijakan akuntansi tentang perlakuan akuntansi atas hibah-hibah yang diterima satker yang belum memiliki DIPA/belum menjadi entitas akuntansi. Selain itu, BNN juga memiliki kebijakan akuntansi atas penerimaan hibah langsung yang terlambat disahkan sebesar Rp9.409.835.261,00. |   |             |                      |                         |            |    |     |            |        |            |   |     |             |                      |                         |

|  | <p>2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan adanya perbedaan pelaporan nilai realisasi penerimaan dan belanja hibah langsung tahun 2016 sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="435 274 1114 552"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sumber Data</th> <th>Pendapatan TA 2016 (Rp)</th> <th>Belanja TA 2016 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bagian Keuangan</td> <td>11.012.089.384,00</td> <td>12.278.453.147,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyusun LK Komnas HAM TA 2016 (SAIBA)</td> <td>11.012.089.384,00</td> <td>12.324.729.645,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OMSPAN</td> <td>10.953.149.384,00</td> <td>12.265.789.645,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Koordinator Keuangan</td> <td>11.961.498.812,00</td> <td>10.336.176.926,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>44.938.826.964,00,00</b></td> <td><b>47.206.149.363,00,00</b></td> </tr> </tbody> </table> | No                          | Sumber Data                 | Pendapatan TA 2016 (Rp) | Belanja TA 2016 (Rp) | 1 | Bagian Keuangan | 11.012.089.384,00 | 12.278.453.147,00 | 2 | Penyusun LK Komnas HAM TA 2016 (SAIBA) | 11.012.089.384,00 | 12.324.729.645,00 | 3 | OMSPAN | 10.953.149.384,00 | 12.265.789.645,00 | 4 | Koordinator Keuangan | 11.961.498.812,00 | 10.336.176.926,00 |  | <b>Jumlah</b> | <b>44.938.826.964,00,00</b> | <b>47.206.149.363,00,00</b> |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|---|--------|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No   | Sumber Data  | Pendapatan TA 2016 (Rp)     | Belanja TA 2016 (Rp)        |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
| 1  | Bagian Keuangan  | 11.012.089.384,00           | 12.278.453.147,00           |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
| 2  | Penyusun LK Komnas HAM TA 2016 (SAIBA)   | 11.012.089.384,00           | 12.324.729.645,00           |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
| 3  | OMSPAN   | 10.953.149.384,00           | 12.265.789.645,00           |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
| 4  | Koordinator Keuangan   | 11.961.498.812,00           | 10.336.176.926,00           |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
|  | <b>Jumlah</b>  | <b>44.938.826.964,00,00</b> | <b>47.206.149.363,00,00</b> |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</b></p> | <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.</li> </ol>   |                             |                             |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
| <p><b>Akibat</b></p>                                 | <p>Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat senilai Rp9.963.171.261,00.</p>   |                             |                             |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |
| <p><b>Saran</b></p>                                  | <p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait, mengenai <i>progress</i> atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan</li> <li>2. Meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.</li> </ol>   |                             |                             |                         |                      |   |                 |                   |                   |   |  |                   |                   |   |        |                   |                   |   |                      |                   |                   |  |               |                             |                             |

4. **Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai**

Terkait K/L Mitra Kerja Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

| <b>Penjelasan</b>  | <b>Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal</b>                |  |                    |
|--|---|--|--------------------|
|  | K/L   | Permasalahan   | Nilai              |
|  | Mahkamah Agung  | Belanja barang menghasilkan Aset Tetap dianggarkan pada Belanja barang   | 643.584.560        |
|  |   | Belanja administrasi proyek (BM) direalisasikan untuk perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan proyek  | 86.510.000         |
|  | <b>Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang</b>               |  |                    |
|  | K/L   | Permasalahan   | Nilai              |
|  | Kejaksanaan RI  | Kelebihan pembayaran   | 173.961.718.806,29 |
|  |   | Ketidaksesuaian spesifikasi teknis   | 102.526.729.273,46 |
|  |   | Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan  | 4.163.324.932,66   |
|  |   | Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai | 11.336.181.421,34  |
| Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda |   | 136.386.389.677,35   |                    |
| Kementerian Hukum dan HAM                                  |   | Pengadaan peralatan dan pengelolaan sentra industri sapi untuk Lapas berupa barang habis pakai dianggarkan menggunakan akun belanja modal  | 3.322.695.780      |
| Komnas HAM   | Kesalahan pembebanan pada penggunaan akun perjalanan dinas dalam kota | 2.650.779.221  |                    |

| K/L                                     | Permasalahan   | Nilai         |
|---|--|---------------|
| Mahkamah Konstitusi                     | Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan Non Belanja Barang  | 1.618.896.221 |
|   | Salah Penganggaran antar akun dalam belanja barang   | 468.835.600   |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Realisasi belanja tidak sesuai substansinya mengakibatkan kurang catat atas aset tetap yang bersumber dari belanja dan penatausahaan aset tetap menjadi tidak tertib | 471.039.723   |

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut.

a. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja modal

| K/L                       | Permasalahan  | Nilai            |
|---------------------------|---|------------------|
| Mahkamah Agung            | Kelebihan Pembayaran yang disebabkan kekurangan volume  | 1.834.135.155,92 |
|                           | Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain  | 1.147.366.441,37 |
|                           | Ketidaksesuaian spesifikasi teknis  | 1.764.760.000    |
|                           | Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan   | 287.362.640      |
|                           | Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau nilai Bank Garansi kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai | 4.901.878.710    |
|                           | Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda  | 857.014.194,66   |
| Kejaksaan Agung           | Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume  | 114.161.914,56   |
|                           | Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain  | 132.222.800      |
| Kementerian Hukum dan HAM | Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume  | 1.724.484.157,72 |
|                           | Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain  | 144.264.117,47   |



| K/L   | Permasalahan   | Nilai            |
|---|--|------------------|
| Kementerian Hukum dan HAM                       | Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda | 4.696.342.244,19 |
| Badan Narkotika Nasional                        | Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume     | 79.017.458,68    |
|   | Ketidaksesuaian spesifikasi teknis                         | 97.000.000       |
|   | Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda | 560.324.063,13   |
| Mahkamah Konstitusi                             | Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume     | 41.635.274,73    |
| Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume     | 826.355.140      |
|   | Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain       | 436.893.356      |
| Komisi Pemberantasan Korupsi                    | Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume     | 42.628.336       |
|   | Ketidaksesuaian spesifikasi teknis                         | 528.800.300      |
|   | Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda | 2.014.961.472,87 |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme         | Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda | 11.869.336       |

b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Barang sebesar Rp540.162.893.041,70 pada 57 K/L dengan rincian sebagai berikut:

| K/L                      | Permasalahan   | Nilai          |
|--------------------------|--|----------------|
| Mahkamah Agung           | Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 187.041.664,13 |
|                          | Kekurangan volume pekerjaan  | 116.607.021    |
| Kejaksaan Agung          | Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 1.147.899.287  |
|                          | Kekurangan volume pekerjaan  | 498.023.600    |
| Kepolisian Negara RI     | Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda                          | 217.308.464    |
| Badan Narkotika Nasional | Kekurangan volume pekerjaan  | 210.472.798    |
|                          | Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda                          | 38.857.989     |
| Komnas HAM               | Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 428.162.512    |
|                          | Realisasi Belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (fiktif)    | 725.664.274    |

| K/L                          | Permasalahan                | Nilai       |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Komisi Pemberantasan Korupsi | Kekurangan volume pekerjaan | 10.400.000  |
| Dewan Perwakilan Daerah      | Kekurangan volume pekerjaan | 456.565.993 |

c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L. Permasalahan perjalanan dinas, diantaranya terjadi pada:

| K/L                       | Permasalahan  | Nilai            |
|---------------------------|---|------------------|
| Mahkamah Agung            | Belum ada bukti pertanggungjawaban                                    | 0                |
|                           | Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran | 1.262.715.990,08 |
|                           | Perjalanan dinas fiktif   | 0                |
| Kejaksaan Agung           | Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran | 32.578.500       |
| Kementerian Hukum dan HAM | Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran | 322.866.462      |
| Komnas HAM                | Belum ada bukti pertanggungjawaban                                    | 3.326.741.612    |
|                           | Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran | 1.197.361.504    |
| Mahkamah Konstitusi       | Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran | 4.486.000        |
|                           | Nama dan No. Tiket tidak sesuai dengan manifest                       | 3.497.500        |
|                           | Harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya                       | 4.061.000        |
| Dewan Perwakilan Daerah   | Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran | 63.412.696       |

d. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L:

| K/L   | Permasalahan                                    | Nilai          |
|---|---|----------------|
| Mahkamah Agung                                  | Pelaksanaan Kontrak                             | 1.540.223.250  |
| Kejaksaan Agung                                 | Pelaksanaan kontrak                             | 903.892.500    |
| Badan Narkotika Nasional                        | Pelaksanaan kontrak                             | 11.123.971.900 |
| Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Pelaksanaan kontrak                             | 0              |
|   | Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 15.100.203.565 |

e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L:

| K/L                            | Permasalahan  | Nilai            |
|--------------------------------|---|------------------|
| Majelis Permusyawaratan Rakyat | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 70.670.700       |
| Mahkamah Agung                 | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 2.366.241.180,52 |
| Kejaksaan Agung                | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 3.380.668.010    |
| Kepolisian Negara RI           | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 36.952.050       |
| Badan Narkotika Nasional       | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 5.001.091.695    |
| Komnas HAM                     | Permasalahan terkait kepatuhan peraturan perundang-undangan                 | 333.338.216      |
| Komisi Pemberantasan Korupsi   | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 603.633.701      |
| Dewan Perwakilan Daerah        | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 13.772.422.000   |
| Komisi Yudisial                | Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan | 756.575.360      |

Khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai temuan sebesar Rp603.633.731,00 disebabkan oleh

1. Terdapat pembayaran jasa percetakan dipungut PPh 22 dengan tarif 1,5%. Berdasarkan UU PPh jasa percetakan dipungut PPh 23 dengan tarif 2% sehingga terdapat kurang pungut PPh sebesar Rp12.517.449,00;
2. Terdapat kelebihan pembayaran atas peningkatan pekerjaan yang tidak mengubah spesifikasi pekerjaan sebesar Rp192.407.130,00 dan nilai pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp440.000.000;
3. Terdapat pemborosan belanja bahan konsumsi untuk pemeriksaan saksi minimal Rp54.688.622,00;
4. Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel sebesar Rp35.378.000,00;
5. Pengadaan jasa yang dihitung dengan harga satuan per jumlah orang yang memuat seluruh biaya orang/seleksi.

|  | <p>Sewa ruangan tes dikategorikan biaya nonpersonil sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp308.202.500,00.</p> <p>Selain itu, terdapat permasalahan pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada mitra kerja Komisi III sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="375 361 1076 609"> <thead> <tr> <th data-bbox="375 361 549 409">K/L</th> <th data-bbox="549 361 933 409">Permasalahan</th> <th data-bbox="933 361 1076 409">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="375 409 549 609">Badan Narkotika Nasional</td> <td data-bbox="549 409 933 609">Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000</td> <td data-bbox="933 409 1076 609">628.003.600</td> </tr> </tbody> </table> | K/L         | Permasalahan | Nilai | Badan Narkotika Nasional | Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000 | 628.003.600 |
|--|--|-------------|--------------|-------|--------------------------|---|-------------|
| K/L  | Permasalahan   | Nilai       |              |       |                          |   |             |
| Badan Narkotika Nasional                             | Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000  | 628.003.600 |              |       |                          |   |             |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;</li> <li>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga.</li> </ol>  |             |              |       |                          |   |             |
| <p><b>Akibat</b></p>                                 | <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran;</li> <li>Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian</li> </ol>  |             |              |       |                          |   |             |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif;</p> <p>c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai;</p> <p>d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak;</p> <p>e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p> | <p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, atas rekomendasi BPK untuk:</p> <p>a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran;</p> <p>b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. Menyelesaikan kelebihan pembayaran/ penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> |